

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kapasitas organisasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Payakumbuh dalam pengelolaan sampah setelah longsohnya TPA Regional telah diupayakan namun belum berjalan secara optimal dan sedang mengalami krisis di berbagai lini. Hal ini berdasarkan hasil temuan di lapangan dan analisis data menggunakan teori kapasitas organisasi menurut Bambang Irawan dengan tiga variabel penelitian, yakni kapasitas teknis, kapasitas manajerial, dan kapasitas institusi. Pelaksanaan dari ketiga kapasitas organisasi tersebut belum mampu menekan volume sampah secara signifikan karena saling berbenturan dan menyisakan sejumlah persoalan yang melumpuhkan siklus pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.

Kapasitas teknis DLH Kota Payakumbuh berada dalam kondisi darurat akibat krisis sumber daya dan sarana prasarana. Keterbatasan kuantitas dan komposisi SDM yang berakar dari moratorium penerimaan pegawai membuat urusan persampahan tidak dipegang oleh tenaga teknis yang tepat. Dari segi anggaran, terdapat kerentanan akibat efisiensi pusat dan gagalnya daya serap belanja modal yang berujung pada tingginya angka SiLPA. Akibatnya, aparat di lapangan harus bekerja dengan sarana prasarana armada truk yang menua, sering rusak, serta kapasitas mesin pengolah yang sangat kecil, sehingga pengelolaan sampah terpaksa kembali pada sistem penimbunan (*open dumping*).

Kapasitas manajerial DLH Kota Payakumbuh juga belum optimal dan cenderung terjebak pada kegiatan rutinitas. Akar permasalahannya bersumber dari disfungsi struktur, di mana DLH bertindak memikul beban ganda sebagai regulator sekaligus operator kebersihan di lapangan. Hal ini diperparah dengan belum maksimalnya mengeksekusi sanksi penindakan karena kekhawatiran akan timbulnya gejolak sosial di tengah masyarakat. Rentetan masalah manajerial ini membuat organisasi kehilangan inovasi, inovasi program yang dijalankan hanya bersifat pengulangan tahunan tanpa ada terobosan strategis.

Kapasitas institusi DLH Kota Payakumbuh dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah juga belum sepenuhnya optimal. DLH telah menjalankan berbagai program pembinaan, seperti pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), kelurahan percontohan, dan Bank Sampah. Namun, pelaksanaan program tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Kondisi ini menyebabkan DLH belum dapat mengetahui secara pasti apakah masyarakat yang telah memperoleh pembinaan tetap menerapkan kebiasaan pengelolaan sampah, khususnya dalam memilah dan mengelola sampah secara mandiri.

Kondisi tersebut juga diperkuat oleh kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah secara mandiri yang masih belum terbentuk secara optimal. Sebagian masyarakat masih memandang bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab pemerintah, sehingga keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah belum menjadi kebiasaan yang dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara DLH dan masyarakat belum cukup kuat

dalam membangun keterlibatan aktif masyarakat serta mendorong perubahan perilaku pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

Dengan demikian, pelaksanaan program pembinaan yang dilakukan DLH belum sepenuhnya menunjukkan keberhasilan dalam membangun kapasitas hubungan dengan masyarakat. Keberadaan program belum cukup apabila tidak disertai dengan pemantauan terhadap keberlanjutan perilaku masyarakat setelah memperoleh pembinaan. Temuan ini menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas institusi DLH pada aspek hubungan eksternal tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan program, tetapi juga dengan kemampuan memastikan keberlanjutan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Penelitian ini masih belum layak untuk dikatakan sempurna dan mempunyai sejumlah kekurangan akibat keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini. Oleh sebab itu, diharapkan bagi peneliti berikutnya dapat melakukan penelitian dan mengembangkan kajian lebih lanjut tentang kapasitas organisasi dalam penanganan bencana lingkungan dan persampahan, baik dari perspektif evaluasi kebijakan maupun manajemen kolaboratif. Sehingga, pengelolaan sampah publik tidak lagi dipandang sekadar masalah teknis kebersihan, melainkan sebagai bagian integral dari tata kelola organisasi pemerintah daerah yang profesional.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan, maka berikut saran dan rekomendasi yang dapat peneliti berikan dalam rangka optimalisasi kapasitas

organisasi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kota Payakumbuh, yakni:

1. Kapasitas Teknis

- Menata ulang komposisi dan struktur jabatan SDM sesuai kebutuhan teknis pengelolaan sampah, bukan sekadar menambah jumlah pegawai.
- Memperkuat perencanaan belanja modal, termasuk kelengkapan syarat teknis (SNI), agar realisasi anggaran optimal dan tidak menyisakan SiLPA.
- Melakukan peremajaan armada pengangkutan secara bertahap untuk menekan biaya pemeliharaan dan menjaga keandalan operasional.

2. Kapasitas Manajerial

- Mempercepat pengusulan perubahan tipologi dinas (Tipe C ke Tipe B) agar dapat membentuk UPTD Persampahan, sehingga fungsi regulator dan operator dapat dipisahkan.
- Mendorong penegakan sanksi Perda Nomor 4 Tahun 2019 secara bertahap dan terukur, didukung percepatan aturan teknis pelaksanaannya.
- Mengembangkan inovasi program yang lebih berorientasi jangka panjang, tidak sekadar melanjutkan program yang sudah berjalan.

3. Kapasitas Institusi

- Membangun mekanisme monitoring dan evaluasi pasca-pembinaan (KSM, kelurahan percontohan, Bank Sampah) untuk memastikan keberlanjutan perubahan perilaku masyarakat.

- Memperluas kemitraan ekonomi Bank Sampah dan Duta Zero Waste dengan pihak ketiga/industri daur ulang agar masyarakat memperoleh insentif ekonomi yang jelas.
- Membangun koordinasi lintas-OPD yang lebih terstruktur, mendorong keterlibatan DPRD dalam pengawasan (tidak hanya pengesahan anggaran), serta memperluas dukungan ke seluruh kelurahan, tidak hanya yang tergabung KSM.

